

Cheque Book Diplomacy di Balik Kebijakan Peralihan Hubungan Diplomatik Solomon Islands dari Taiwan ke Tiongkok pada Tahun 2019

Katong Ragawi Numadi
Universitas Bali Internasional

Abstrak

Sejak mendapatkan kemerdekaannya, Solomon Islands menjadi partner strategis bagi Taiwan di kawasan Pasifik Selatan. Di tengah keputusan internasional terkait pengakuan kedaulatan Tiongkok atas dasar One China Principle, Solomon Islands bersama beberapa Negara-negara Pasifik Selatan tetap konsisten dalam mendukung ketergantungan Taiwan. Sebagai timbal baliknya, Solomon Islands menjadi negara penerima bantuan pembangunan terbesar dari Taiwan di Kawasan Pasifik Selatan. Akan tetapi pada akhir tahun 2019 secara mengejutkan Pemerintah Solomon Islands menetapkan kebijakan peralihan hubungan diplomatik dari Taiwan ke Tiongkok. Hal ini ditandai dengan kunjungan langsung jajaran pemerintahan Solomon Islands ke Beijing sekaligus menandatangani keikutsertaannya dalam program pembangunan Belt and Road Initiative (BRI) rancangan Tiongkok. Tulisan ini menampilkan bahwasanya keputusan peralihan dukungan Solomon Islands tidak lepas dari dinamika cheque book diplomacy Tiongkok dan Taiwan di Pasifik Selatan. Dalam dua dekade terakhir pengaruh Tiongkok meningkat secara signifikan dilihat dari intensitas bantuan dan lingkup kerjasama lainnya terhadap negara-negara “aliansinya” di kawasan. Sebaliknya intensitas bantuan dan kerjasama yang dilakukan Taiwan di kawasan, khususnya bagi Solomon Islands terbilang konstan dan terbatas.

Kata Kunci: *Solomon Islands, Tiongkok, Taiwan, Cheque-book diplomacy*

Abstract

Since gaining its independence, the Solomon Islands have become a strategic partner for Taiwan in the South Pacific region. In the midst of international decisions regarding the recognition of China’s sovereignty on the basis of the One China principle, the Solomon Islands together with several South Pacific countries have remained consistent in supporting Taiwan’s independence. In return, the Solomon Islands became the largest recipient of development assistance from Taiwan in the South Pacific Region. However, at the end of 2019 surprisingly the Government of the Solomon Islands established a policy of shifting diplomatic relations from Taiwan to China. This was marked by a direct visit by the Solomon Islands government officials to Beijing as well as signing their participation in the China-designed Belt and Road Initiative (BRI) development program. This paper shows that the decision to transfer Solomon Islands support cannot be separated from the dynamics of cheque book diplomacy between China and Taiwan in the South Pacific. In the last two decades, China’s influence has increased significantly in terms of the intensity of its assistance and other scopes of cooperation with its “alliance” countries in the region. In contrast, the intensity of assistance and cooperation carried out by Taiwan in the region, especially for the Solomon Islands, is fairly constant and limited.

Keywords: *Solomon Islands, China, Taiwan, Cheque-book diplomacy*

Pendahuluan

Kawasan Pasifik Selatan menjadi salah satu arena strategis dalam persaingan diplomatik antara Tiongkok dan Taiwan. Peralihan pengakuan internasional dari Taiwan (Republic of China) ke Tiongkok (People's Republic of China) pada tahun 1979 menjadikan Negara-negara Pasifik Selatan (PICs) yang baru memperoleh kemerdekaan diambang kebimbangan antara berpihak pada Tiongkok atau Taiwan. Mayoritas PICs pada akhirnya memutuskan untuk patuh terhadap ketentuan internasional dalam prinsip *One China Policy*. Namun beberapa di antaranya tetap konsisten mendukung Taiwan sebagai entitas berdaulat. Salah satu titik sentral dalam persaingan diplomatik Tiongkok-Taiwan adalah Solomon Islands yang merupakan negara terbesar ketiga di regional setelah Papua Nugini dan Fiji. Saat mendapatkan otoritas untuk mendirikan pemerintahannya sendiri di tahun 1978, pemerintahan baru Solomon Islands sejatinya telah bernegosiasi membangun hubungan diplomatik dengan Tiongkok. Akan tetapi, di saat yang sama pihaknya juga tidak menutup kemungkinan membuka relasi dengan Pemerintahan Taiwan. Hingga kemudian pada tahun 1983, Pemerintah Solomon Islands resmi mengakui Taiwan sebagai negara berdaulat sekaligus representasi masyarakat Tionghoa yang sah (Aqorau 2021). Sejak saat itu Solomon Islands satu dari sebagian kecil negara di dunia yang tidak pernah membuka hubungan diplomatik resmi dengan Tiongkok, walaupun tidak sepenuhnya menutup kerjasama bidang perdagangan dan investasi.

Perubahan besar terjadi pada tahun 2019, pemerintahan baru Democratic Coalition Government for Advancement (DCGA) di bawah Perdana Menteri Manasseh Sogavare menekankan pentingnya peninjauan ulang hubungan diplomatik Solomon Islands dengan Taiwan. Alhasil melalui mekanisme internal, pemerintah memutuskan untuk membuka hubungan diplomatik dengan Tiongkok sekaligus mengakhiri pengakuan panjangnya atas kedaulatan Taiwan. Berbeda dengan negara lain seperti Nauru, Kiribati, dan Marshall Islands yang telah beberapa kali melakukan peralihan pengakuan diplomatik antara Tiongkok dan Taiwan, keputusan Solomon Islands mengakui Tiongkok merupakan perihal baru. Peralihan hubungan diplomatik salah satu negara terbesar di Pasifik Selatan menghasilkan implikasi signifikan bagi skala jaringan diplomatik Taiwan secara global. Kini hanya terdapat empat belas negara di dunia yang mengakui eksistensi kedaulatan Taiwan. Sebanyak tiga belas di antaranya merupakan negara-negara kecil Pasifik Selatan meliputi Palau, Nauru, Tuvalu, dan Marshall Islands. Sebaliknya bagi Tiongkok, pengakuan kedaulatan dari Solomon Islands menjadi pencapaian diplomatik penting tidak hanya dalam mereduksi eksistensi Taiwan, namun semakin memperkuat pengaruhnya di Kawasan Pasifik Selatan.

Tabel 1. Afiliasi Politik Tiongkok dan Taiwan di Pasifik Selatan

Tiongkok	Taiwan
Papua Nugini	Nauru
Fiji	Palau
Samoa	Marshall Islands
Vanuatu	Tuvalu
Tonga	
Federasi Mikronesia	
Niue (Freely Associated State)	
Cook-Islands (Freely Associated State)	
Kiribati	
Solomon Islands	

Sumber: Gabungan Penulis

Tulisan ini memaparkan bahwasanya transisi diplomatik yang dilakukan Solomon Islands tidak lepas dinamika proses *cheque book diplomacy*. Sejak awal, perdagangan, investasi, dan bantuan luar negeri menjadi instrumen utama dalam persaingan diplomatik antara Tiongkok dan Taiwan di Pasifik Selatan. Keduanya berlomba untuk meningkatkan perhatiannya terhadap masalah ekonomi dan sosial bagi pemerintah dan masyarakat di negara-negara kawasan setempat. Meskipun masih jauh di bawah Australia, akan tetapi distribusi material keduanya terbilang sangat signifikan. Berdasarkan data Pacific Aid Map (2021) aliran bantuan pembangunan Taiwan ke negara-negara Pasifik Selatan secara keseluruhan mencapai 497,66 juta USD. Begitu pula data yang sama menunjukkan bahwa jumlah total aliran dana dari Tiongkok ke Pasifik Selatan sebesar 2,73 miliar USD. Khusus di Solomon Islands, sejatinya Taiwan telah berperan sebagai negara pendonor utama. Akan tetapi dalam beberapa tahun terakhir Tiongkok telah meningkatkan dana bantuannya secara signifikan, sehingga menjadi pertimbangan penting dibalik keputusan peralihan hubungan diplomatik oleh Pemerintah Kepulauan Solomon.

Diplomasi Dolar dan Pragmatisme dalam Kebijakan Luar Negeri *Less Developed States*

Secara sederhana konsep diplomasi dolar dapat didefinisikan sebagai upaya penggunaan instrumen *soft-power* meliputi peningkatan perdagangan dan pemberian investasi serta bantuan luar negeri oleh suatu negara ke negara lain dalam rangka memperoleh keuntungan politik, ekonomi, dan pertahanan. Dengan mengalirkan dana beserta bentuk material lainnya, diharapkan terjadi perubahan kebijakan luar negeri dari negara penerima yang menguntungkan bagi pihak pendonor. Menurut Munro (1964), konsep diplomasi dolar pertama kali berkembang di kalangan pembuat kebijakan di Amerika Serikat pada periode awal abad ke-20. mengimplementasikan Monroe Doctrine yang menekankan pada pentingnya meningkatkan pengaruh di Kawasan Karibia dalam upaya menghambat ekspansi

kolonialisme Negara-negara Eropa. Salah satu instrumen yang dinilai efisien adalah melalui peningkatan bantuan dana dan manajerial bagi Negara-negara Karibia, mengingat di kala itu perekonomian Amerika Serikat juga sedang mengalami perkembangan signifikan. Melalui skema bantuan material, diharapkan tercipta keberpihakan negara-negara tersebut terhadap Amerika Serikat yang secara otomatis mereduksi eksistensi kekuatan Eropa di kawasan.

Penerapan diplomasi dolar dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat kian eksis pada era pemerintahan William H. Taft. Pada periode ini, implementasi diplomasi dolar dilakukan dalam dua program yakni, pertama adalah dengan meningkatkan dominasi finansial Amerika Serikat di negara-negara lain melalui program bantuan luar negeri dan investasi dalam jumlah besar. Kedua, Pemerintah Amerika Serikat memberikan bantuan dan panduan tata kelola perekonomian domestik kepada negara-negara tersebut. Alhasil keuntungan yang diperoleh tidak sebatas ranah ekonomi, melainkan kepentingan politik internasional Amerika Serikat yang berhubungan dengan stabilitas kawasan, meminimalisir revolusi, dan menahan pengaruh Eropa dapat tercapai (Munro 1964). Keberhasilan tersebut membuktikan efisiensi penggunaan kekuatan ekonomi negara-negara besar dalam mengontrol kebijakan luar negeri bahkan hingga situasi internal negara-negara yang lebih kecil tanpa secara langsung menggunakan instrumen kekuatan militer. Maka dalam perkembangannya, penerapan diplomasi dolar semakin sering digunakan oleh Amerika Serikat maupun negara-negara kekuatan besar lainnya dalam melancarkan kepentingan regional maupun internasionalnya.

Sedikit berbeda dari pemahaman Munro, Maddern (2020) dalam tulisannya mengungkapkan bahwa diplomasi dolar semula didesain pemerintah Amerika Serikat era Theodore Roosevelt dan William H. Taft atas dasar kepentingan ekonomi dan bisnis. Terdapat kekhawatiran dari kalangan elit pemerintahan dan pebisnis apabila perkembangan industrialisasi yang dialami tidak seimbang dengan kapasitas konsumsi domestik yang sangat terbatas. Maka dari itu ekspor kapital dalam bentuk pemberian bantuan luar negeri, pinjaman, dan investasi langsung terhadap negara-negara baru di Kawasan Karibia, Amerika Latin, dan Asia Timur pada saat itu dianggap efisien tidak hanya dalam menghindarkan dari ancaman krisis, namun menjadikan Amerika Serikat sebagai *commercial dan financial world power*. Penerapan kebijakan ini seketika memberikan implikasi signifikan bagi iklim industri dan bisnis Amerika Serikat. Stagnasi ekonomi yang terjadi sejak tahun 1870, hingga menimbulkan kepanikan di awal dekade 1890-an berubah menjadi optimisme pertumbuhan. Bahkan hanya butuh waktu tiga dekade di awal abad ke-20 bagi Amerika Serikat untuk menjadi *major economic power* yang mempunyai pengaruh perdagangan dan finansial di seluruh dunia (Maddern 2020).

Dalam perkembangannya diplomasi dolar tidak sekadar difungsikan dalam menunjang kepentingan ekonomi dan bisnis, melainkan dilihat sebagai alat mencapai kepentingan politik internasional Amerika Serikat yang kian meningkat. Pandangan ini pertama kali dikemukakan Charles A. Conant dan Paul S. Reinsch dengan istilah *open-door policy* (Maddern 2020). Konsep ini merujuk pada kebijakan ekspansi pengaruh politik melalui pengembangan sistem investasi dan perdagangan internasional. Pengintegrasian daerah koloni dan negara-negara baru ke dalam sistem dinilai akan menciptakan kontrol politik yang jauh lebih efisien ketimbang pola kolonialisme yang umum digunakan oleh Negara-negara Eropa pada saat itu. Pola kebijakan luar negeri tersebut mulai digunakan selaras dengan Monroe Doctrine pada dekade awal tahun 1900-an. Secara perlahan Amerika Serikat di bawah Theodore Roosevelt mulai beralih menggunakan kekuatan ekonomi dalam mewujudkan stabilitas politik dan ekonomi Kawasan Karibia dan Amerika Latin. Diplomasi dolar kemudian menjadi preferensi utama pemerintahan William Taft yang memang lebih menekankan peran kalangan ekonom dan pebisnis dalam implementasi Doktrin Monroe. Salah satunya di Nikaragua yang mana pemerintah Amerika Serikat mengalirkan dana besar bagi aksi revolusi Juan Estrada guna menggulingkan Pemerintahan Zelaya. Keberhasilan kudeta di Nicaragua kemudian diikuti pemberian bantuan, pinjaman, dan investasi bagi pemerintahan baru yang secara tidak langsung memberikan kontrol politik Amerika Serikat atas negara tersebut (Maddern 2020).

Kesuksesan diplomasi dolar Amerika Serikat menunjukkan bahwa kebijakan luar negeri negara-negara kecil dalam beberapa hal mudah dipengaruhi kekuatan ekonomi negara-negara besar. Terdapat kecenderungan pragmatisme dalam kebijakan luar negeri *less-developed states*, utamanya ketika dihadapkan pada kepentingan negara besar. Menurut Elman (1995) di kalangan kebanyakan analisis Hubungan Internasional, kebijakan luar negeri negara-negara kecil, *small developed states*, atau *weak states* lebih dipengaruhi struktur tatanan internasional ketimbang faktor dinamika domestik. Hal ini dikarenakan dibandingkan negara-negara kekuatan besar dan menengah, tekanan eksternal dan paksaan sistemik lebih besar dialami oleh Negara-negara kecil yang relatif memiliki kapabilitas sumber daya yang sangat terbatas. Maka dari itu adanya perubahan kebijakan luar negeri negara-negara kecil selalu dapat dikaitkan dengan dinamika distribusi kekuatan pada tataran regional dan internasional utamanya yang terjadi di kalangan *great power*. Dalam hal ini terdapat kecenderungan negara-negara kecil “mengaliansikan” diri dengan negara kekuatan dominan sebagai mekanisme umum dalam mengatasi dilema keamanan sekaligus memaksimalkan keuntungan politik maupun ekonomi (Elman 1995).

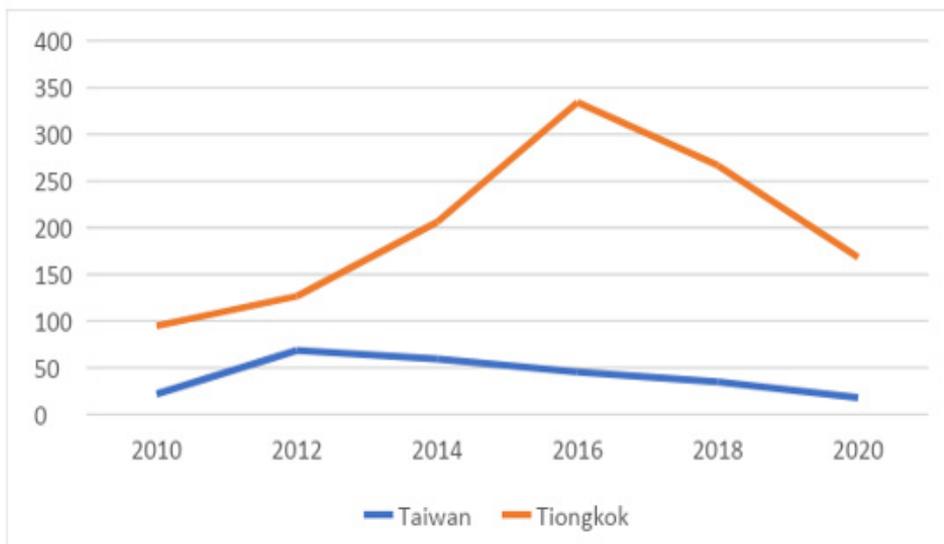
Serupa penjelasan Elman, tulisan Steinsson dan Thorhallsson (2017) memaparkan bahwa *small states* berhadapan dengan situasi internasional yang lebih sulit dikarenakan kapasitas dan kapabilitas wilayah, populasi, militer serta ekonomi yang terbatas. Dalam situasi tersebut, sejatinya kebijakan strategis negara-negara kecil mengatasi kompleksitas permasalahannya tidak dapat didefinisikan secara umum. Akan tetapi terdapat beberapa pilihan kebijakan yang dapat dilakukan mulai dari mengaliansikan diri, bersikap netral, atau bahkan mengimbangi kekuatan besar di sekelilingnya. Namun demikian, sebagian besar literatur kebijakan luar negeri menjelaskan bahwa negara-negara kecil mensubordinasikan diri dengan pihak paling dominan di kawasan. Hal ini dilakukan dalam rangka mendapatkan keuntungan keamanan yang meliputi perlindungan integritas teritorial, meminimalisir ketidakpastian dan perselisihan internasional, dan menekankan standar perilaku regional dan internasional. Selain itu, guna mendapatkan kebutuhan politik, ekonomi, dan sosialnya, Negara-negara kecil memiliki kecenderungan untuk mencari *shelter*, “beraliansi” dengan negara-negara besar atau berpartisipasi aktif dalam organisasi regional maupun internasional. Hal ini dikarenakan *small states* membutuhkan bantuan internasional, baik dalam konteks ekonomi, sosial, politik, bahkan militer untuk tetap eksis dalam tatanan internasional (Steinsson dan Thorhallsson 2017).

Cheque-Book Diplomacy dalam Persaingan Diplomatik Tiongkok dan Taiwan di Pasifik Selatan

Kawasan Pasifik Selatan menjadi salah satu titik sentral dalam persaingan diplomatik Tiongkok dan Taiwan. Pasca mendapatkan kemerdekaan, negara-negara di Pasifik Selatan (PICs) dihadapkan pada pilihan untuk mengakui kedaulatan Tiongkok atau berafiliasi dengan Taiwan. Sebagian besar negara baru di kawasan memutuskan mengikuti keputusan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) berpihak pada Tiongkok. Akan tetapi, besarnya kontribusi bantuan dari Taiwan mengakibatkan enam dari empat belas PICs mengabaikan keputusan internasional mengenai *One China Policy*. Bagi Taiwan, Pasifik Selatan adalah kawasan penting dalam memperoleh kembali pengakuan internasional sebagai negara merdeka. Sebaliknya kawasan ini menjadi salah satu kunci bagi Pemerintah Tiongkok mewujudkan *core interest* reunifikasi dengan Taiwan. Kompleksitas permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapi negara-negara kecil di kawasan ini mengakibatkan tingginya tingkat ketergantungan terhadap bantuan pembangunan dari negara-negara lain. Situasi ini yang kemudian dimanfaatkan Tiongkok dan Taiwan dalam memperkuat legitimasi politiknya masing-masing melalui optimalisasi pemberian bantuan luar negeri, investasi, dan peningkatan relasi dagang bersama negara-negara di kawasan (Salem 2020).

Praktik diplomasi dolar Tiongkok dan Taiwan di Pasifik Selatan kemudian secara khusus dikenal dengan istilah *cheque-book diplomacy*. Dorongan persaingan diplomatik menjadikan baik Tiongkok maupun Taiwan menjadi aktor berpengaruh dalam perekonomian Kawasan Pasifik Selatan, kendati masih lebih rendah dibandingkan negara pemain lama seperti Australia, Jepang, dan Amerika Serikat. Berdasarkan data Pacific Aid Maps (2021) pada tahun 2008, Pemerintah Taiwan telah mengalokasikan dana sebesar 21,5 juta USD guna mendukung berbagai proyek pembangunan di kawasan. Jumlah dana dari Taiwan mencapai puncaknya di kisaran 38-70 juta USD per tahun pada pertengahan dekade 2010-an, meskipun cenderung mengalami penurunan memasuki tahun 2020. Secara keseluruhan tercatat Pemerintah Taiwan telah mengalirkan dana bantuan ke Pasifik Selatan hingga sebesar 497,6 juta USD, atau berkisar 1% dari keseluruhan dana bantuan internasional ke Pasifik Selatan dalam rentang tahun 2008-2021. Solomon Islands menjadi negara penerima bantuan terbesar dari Taiwan dengan nilai total 137,22 juta USD. Diikuti Kiribati dan Marshall Islands dengan distribusi bantuan masing-masing 128 juta USD dan 76,63 juta USD.

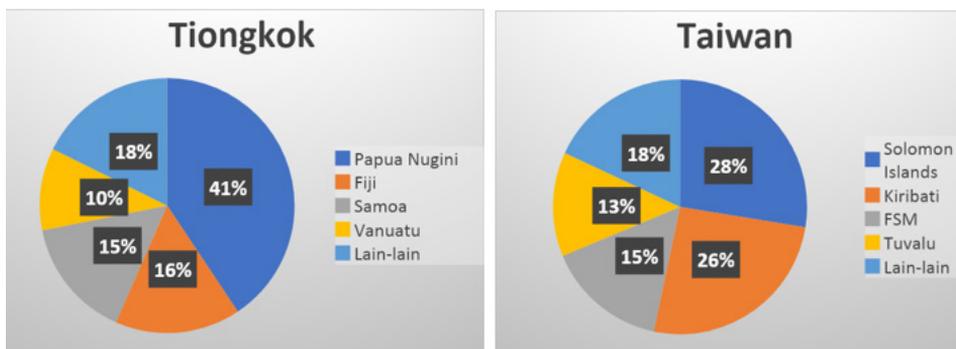
Grafik 1. ODA Taiwan dan Tiongkok di Kawasan Pasifik Selatan (Dalam Juta USD)



Sumber: PacificAid Maps 2021

Dihadapkan pada serangkaian permasalahan domestik dan fokus dalam mereformasi perekonomian mengakibatkan pengaruh Tiongkok di Pasifik Selatan tidak begitu dominan hingga akhir dekade 1990-an. Kehadiran dan kontribusi Tiongkok mulai terlihat di Pasifik Selatan ditandai kehadiran Premier Wen Jiabao ke Fiji pada tahun 2006 yang merupakan kunjungan pertama jajaran pimpinan tertinggi Tiongkok ke Pasifik Selatan. Dalam kunjungan tersebut Tiongkok menyerahkan dana bantuan hingga sebesar 121 juta USD bagi upaya Pemerintah Fiji menyelesaikan masalah perang sipil dan membangun kembali kondisi sosial dan ekonomi di negaranya. Selain itu Tiongkok juga mulai merancang skema bilateral dan regional dalam meningkatkan kontribusinya bagi ambisi pembangunan sosial ekonomi di kawasan (Zhang 2014). Alhasil dalam rentang tahun 2006-2011 diestimasikan bahwa nilai total bantuan Tiongkok mencapai 850 juta USD, menempatkannya sebagai negara pendonor terbesar kelima di Pasifik Selatan. Begitupun dilihat dari aspek perdagangan, *trade value* akumulatif Tiongkok di kawasan meningkat signifikan dari hanya 248 juta USD pada tahun 2000 menjadi 1,77 miliar USD dalam rentang tahun 2001-2012. Selain bantuan dan perdagangan, relasi baru Tiongkok dan PICs juga ditandai investasi perusahaan-perusahaan Tiongkok yang ditaksir mencapai 700 juta USD guna mendanai proyek pembangunan besar utamanya di Papua Nugini, Samoa, dan Fiji (Zhang 2014).

Grafik 2. Distribusi Bantuan Tiongkok dan Taiwan Bagi PICs



Sumber: Gabungan Penulis

Pengaruh Tiongkok di Kawasan Pasifik Selatan berkembang lebih signifikan di bawah kekuasaan Xi Jinping. Integrasi Pasifik Selatan dalam skema Belt and Road Initiative (BRI) menjadi landasan bagi penguatan konektivitas ekonomi antara Tiongkok dan PICs. Data mencatat terdapat tren peningkatan dana bantuan pembangunan Tiongkok ke Negara-negara Pasifik Selatan dalam satu dekade terakhir. Dapat dilihat pada Grafik 1, umlah *official aid assistance* (ODA) Tiongkok pada tahun 2012 ditaksir mencapai 126,66 juta USD atau berkisar 5% dari keseluruhan aliran

bantuan internasional ke Pasifik Selatan pada tahun tersebut. Angka tersebut mengalami serangkaian peningkatan hingga mencapai 334 juta USD, atau berkisar 15% dari total ODA Pasifik Selatan pada tahun 2016. Walaupun pada tahun-tahun setelahnya mengalami penurunan, namun Tiongkok tetap menjadi salah satu negara pendonor terbesar di kawasan dengan nilai total mencapai 2,37 miliar USD atau 7% dari total ODA internasional ke Pasifik Selatan dalam kurun waktu 2008-2021. Papua Nugini menjadi negara kawasan penerima bantuan pembangunan terbesar dari Tiongkok dengan nilai mencapai 964,11 juta USD. Disusul Fiji dan Samoa yang mendapatkan aliran dana bantuan sebesar 378 juta USD dan 362 juta USD secara keseluruhan (Pacific Aid Maps, 2021). Lebih lanjut Pemerintah Tiongkok mengklaim bahwa nilai perdagangan Tiongkok dan Pasifik Selatan juga mengalami pertumbuhan hingga 13% per tahun. Pada tahun 2021 perdagangan Tiongkok dengan PICs yang memiliki hubungan diplomatik langsung diperkirakan mencapai angka 5,3 miliar USD dengan nilai investasi total berkisar 2,7 miliar USD (Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China 2021).

Dinamika Hubungan Solomon Islands dengan Taiwan dan Tiongkok

Sebagai salah satu negara terbesar di Kawasan Pasifik Selatan, Kepulauan Solomon terbilang penting dalam kontestasi diplomatik antara Tiongkok dan Taiwan. Sejak mendapatkan kemerdekaan penuh dari Britania Raya pada tahun 1978, pemerintahan yang baru berdiri telah dihadapkan pada dilema antara membangun hubungan diplomatik dengan Taiwan atau mengikuti keputusan internasional mengakui kedaulatan Tiongkok. Semula terlihat adanya preferensi membuka hubungan diplomatik dengan Tiongkok. Akan tetapi pada tahun 1983 Pemerintah Solomon Islands resmi memutuskan memilih mengakui kedaulatan Taiwan ketimbang Tiongkok (Aqorau 2021). Menurut Biddick (1989) keputusan Solomon Islands tersebut berlandaskan beberapa faktor. Pertama berkaitan dengan dinamika Perang Dingin yang melibatkan pertentangan Tiongkok dengan kekuatan Barat. Kedua adalah sensitivitas pemerintahan dan masyarakat Solomon Islands terhadap eksistensi Tiongkok sebagai negara komunis. Alasan ketiga berhubungan dengan perkembangan perekonomian Taiwan yang pada saat itu jauh lebih baik dibandingkan Tiongkok. Sehingga Pemerintah Solomon Islands mengharapkan Taiwan dapat memberikan kontribusi besar bagi kompleksitas permasalahan pembangunan sosial dan ekonominya.

Pada dasarnya kedekatan Solomon Islands-Taiwan dibangun secara gradual dimulai dari hubungan informal sejak masa awal kemerdekaan. Pada periode tersebut tercatat terdapat empat kali kunjungan langsung Perdana Menteri Solomon Islands ke Taiwan. Hingga kemudian pada

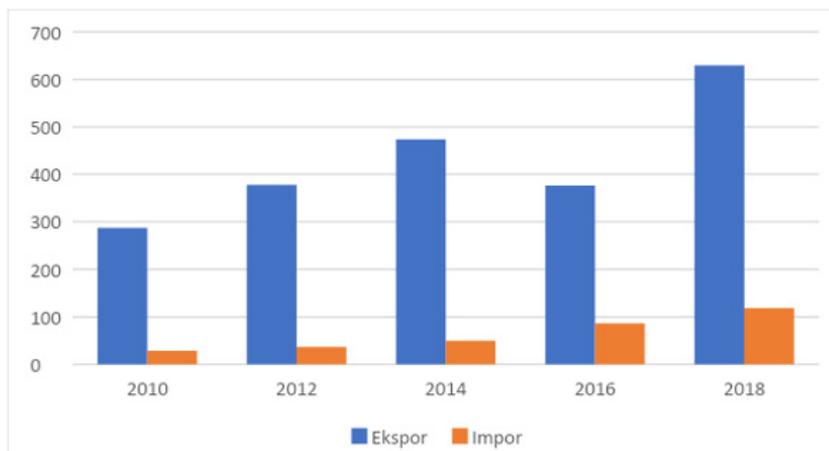
tahun 1983 Pemerintah Solomon Islands memutuskan membangun hubungan tingkat konsular dengan Taiwan. Hubungan diplomatik formal di antara keduanya baru disepakati dua tahun berselang ditandai dengan pendirian Kedutaan Besar Taiwan di Ibu Kota Honiara. Terciptanya relasi diplomatik melandasi peluang kerjasama yang lebih besar bagi kedua pihak. Seiring adanya ambisi besar Pemerintah Solomon Islands dalam mengatasi kompleksitas permasalahan sosial-ekonomi nasional, pada tahun 1990-an dirancang kerangka program pembangunan nasional dengan istilah Constituency Development Funds (CDF) yang mana Pemerintah Taiwan sepakat bertindak sebagai penyedia dana utama (Aqorau 2021). Perubahan fokus kebijakan Taiwan dalam mempertahankan legitimasinya telah menempatkan Solomon Islands sebagai salah satu pilar strategisnya. Sehingga relasi kerjasama kedua pihak terus mengalami peningkatan ditandai dengan pendirian kantor kedutaan Solomon Islands di Taipei pada tahun 2005. Begitu pula pada tahun 2007, perwakilan Solomon Islands dalam UN bersama perwakilan dari negara-negara pendukung Taiwan lainnya mulai menginisiasi pembahasan perihal isu kedaulatan Taiwan dalam agenda General Assembly UN (Putri 2019). Program pemerintah hingga aktivitas masyarakat Solomon Islands dari segala sektor semakin bergantung pada distribusi pendanaan dari Taiwan. Bahkan pada tahun 2008, federasi sepak bola Solomon Islands meminta pendanaan sebesar 30 ribu USD dari Pemerintah Taiwan guna mendanai keikutsertaannya dalam turnamen sepak bola tingkat Oceania.

Royalitas pendanaan dari Taiwan tidak dipungkiri menjadi kunci di balik kesetiaan Solomon Islands mendukung kemerdekaan Taiwan selama lebih dari 36 tahun. Menurut Transform Aqorau (2021) sedari awal hubungan diplomatik Solomon Islands dan Taiwan cenderung dibangun atas dasar kepentingan politik dan ekonomi elit yang dalam beberapa hal justru merugikan publik Solomon Islands. Maka dari itu alih-alih menciptakan hubungan resiprokal berlandaskan *mutual trust* dan *goodwill*, stabilitas hubungan keduanya bergantung pada sejauh mana intensitas dukungan Taiwan mendanai program elit Pemerintahan Solomon Islands. pendanaan proyek Constituency Development Fund (CDF) dari Taiwan menjadi titik krusial bagi keberlangsungan hubungan kedua pihak. Data Transparency Solomon Islands dan United Nations Democracy Fund (UNDEF) mencatat bahwa anggaran program CDF tahun 2013 mencapai 36,7 juta USD yang mana sekitar 6,1 juta USD di antaranya didanai Pemerintah Taiwan. Pada tahun 2015 estimasi *budget* CDF berkisar 32 juta USD, dialokasikan dalam berbagai program pembangunan mulai dari infrastruktur sanitasi, kelistrikan, kesehatan, dan pendidikan. Sebanyak 8,55 juta USD di antaranya berasal dari dana hibah Pemerintah Taiwan. Lebih lanjut data tersebut memproyeksikan bahwa pada tahun 2017 dari 45,1 juta USD estimasi dana CDF, Pemerintah Taiwan mampu berkontribusi pada kisaran nilai yang sama yakni 8,5 juta USD. Pengabaian terhadap Taiwan

dapat mendatangkan konsekuensi berupa berkurangnya sumber pendanaan program pembangunan secara signifikan sekaligus hilangnya salah satu sumber dukungan material bagi aktivitas politik elit pemerintahan Solomon Islands.

Pengakuan terhadap kedaulatan Taiwan, beserta serangkaian manfaat ekonomi yang didapat tidak serta merta membuat Solomon Islands memutuskan sepenuhnya hubungan informal dengan Tiongkok. Sebelum keputusan keberpihakan pada Taiwan, Perdana Menteri Alebua beserta jajaran pemerintahannya intens melakukan kunjungan ke Tiongkok dalam upaya mengeksplorasi peluang pembukaan hubungan diplomatik di antara kedua pemerintahan. Walaupun berujung kegagalan, relasi Solomon Islands-Tiongkok terpelihara tanpa koneksi diplomatik langsung. Seperti halnya pada dekade 1980-an terdapat memorandum of understanding (MoU) terkait *sister city* antara Provinsi Guadalcanal (Solomon Islands) dan Provinsi Guangdong (Tiongkok). Kerjasama tersebut memuat berbagai aspek salah satunya tentang *technical assistance* dan pendanaan terhadap pengembangan *shipbuilding* beserta fasilitas pengolahan produk tuna di kawasan Guadalcanal (Biddick, 1989). Sejak saat itu kerjasama bidang ekonomi di antara keduanya berkembang signifikan terutama menyangkut bidang perikanan, pertambangan, dan kehutanan. Tanpa relasi formal, Solomon Islands berada di urutan teratas sebagai destinasi utama bagi produk ekspor dari Tiongkok di Pasifik Selatan. Begitupun sebaliknya, 90% hasil alam Solomon Islands menyuplai tumbuh kembang industri-industri di Tiongkok sejak masa awal reformasi ekonomi (Nicholas, 2021)

Grafik 3. Intensitas Perdagangan Solomon Islands dengan Tiongkok tahun 2010-2018 (Dalam Juta USD).



Sumber: World Integrated Trade Solutions, 2019

Kendati tidak memiliki hubungan diplomatik, data menunjukkan bahwa Tiongkok merupakan partner perdagangan terpenting bagi perekonomian Solomon Islands. Data Asian Development Bank (dalam Gay, 2016) mencatat nilai ekspor ke Tiongkok pada tahun 2008 telah mencapai 200 juta USD. Angka tersebut kemudian meningkat signifikan hingga pada kisaran 360 juta USD pada tahun 2013. Sebaliknya, data yang sama menunjukkan bahwa pada tahun 2013 nilai impor Solomon Islands dari Tiongkok ialah sebesar 40 juta USD, atau berada di urutan ketiga setelah Australia dan Singapura. Hubungan kedua negara semakin dekat selaras volume perdagangan yang kian meningkat. Data World Bank (2023) memperkirakan bahwa pada tahun 2017 nilai perdagangan di antara keduanya telah mencapai kisaran 647,5 juta USD. Sementara setahun berselang Solomon Islands dan Tiongkok mencatatkan nilai perdagangan hingga 747,5 juta USD. Sebagian besar arus perdagangan tersebut didominasi produk *raw materials* seperti kayu, bahan tambang, dan perikanan yang banyak ditemukan di wilayah Solomon Islands.

Kebijakan Peralihan Dukungan Diplomatik Solomon Islands dari Taiwan ke Tiongkok pada Tahun 2019

Meningkatnya pengaruh Tiongkok di kalangan PICs berpuncak pada kebijakan Pemerintah Solomon Islands beralih mendukung Tiongkok di tahun 2019. Langkah tersebut berawal inisiatif Pemerintah Solomon Islands di bawah Perdana Menteri Ricky Hoenipwela dan Partai DAP mengkaji ulang relasi diplomatik negaranya dengan Taiwan didasari dinamika politik internal dan adanya visi mengembangkan kebijakan *south-south cooperation and partnership* yang mana Tiongkok dapat berkontribusi besar di dalamnya (Aqorau 2021). Walaupun pada akhirnya Partai DAP mengalami kekalahan pada pemilihan umum tahun 2019, pemerintahan baru pimpinan Manasseh Sogavare memiliki pandangan serupa, bahwasanya peluang peralihan hubungan diplomatik dari Taiwan ke Tiongkok patut dipertimbangkan. Maka dari itu mengkaji ulang hubungan dengan Taiwan sekaligus mengkalkulasikan kemungkinan beralih mendukung Tiongkok menjadi agenda penting dalam rencana jangka pendek Democratic Coalition Government for Advancement (DGCA) yang baru terbentuk. Melalui serangkaian proses penilaian, diikuti survey ke beberapa PICs “aliansi” Tiongkok, Pemerintah Solomon Islands pada September tahun 2019 pada akhirnya memutuskan berbalik berpihak kepada Tiongkok dan berkomitmen terhadap prinsip *One China Policy* (Foukona 2020).

Keputusan Solomon Islands (diikuti Kiribati) beralih mendukung Tiongkok menjadi kekalahan besar bagi pihak Taiwan. Tersisa hanya empat dari empat belas PICs yang tetap berkomitmen mendukung kemerdekaan Taiwan. Selain itu, berbeda dengan Kiribati, Solomon Islands tergolong

kekuatan regional utama sekaligus sekutu strategis bagi Taiwan di Pasifik Selatan. Sampai tahun 2019, Solomon Islands tetap menjadi negara penerima bantuan luar negeri terbesar dari Taiwan (Zhang 2019). Sebagai timbal balik, Pemerintah Solomon Islands konsisten mendukung keikutsertaan Taiwan dalam setiap agenda internasional bahkan hingga di titik terakhir sebelum keputusan peralihan diplomatik terealisasi. Keputusan Solomon Islands (diikuti Kiribati) beralih mendukung Tiongkok merupakan kekalahan besar bagi pihak Taiwan. Tersisa hanya empat dari empat belas PICs yang tetap berkomitmen mendukung kemerdekaan Taiwan, di antaranya Nauru, Tuvalu, Marshall Islands, dan Palau. Selain itu, berbeda dengan Kiribati, Solomon Islands merupakan salah satu PICs terbesar sekaligus menjadi sekutu strategis bagi Taiwan di kawasan. Hal ini dapat dilihat dari fakta bahwasanya sampai tahun 2019, Solomon Islands tetap menjadi negara penerima bantuan luar negeri terbesar dari Taiwan (Zhang 2019). Sebagai timbal balik, Pemerintah Solomon Islands konsisten mendukung keikutsertaan Taiwan dalam setiap agenda internasional bahkan hingga di titik terakhir sebelum keputusan peralihan diplomatik terealisasi. Maka dari itu menyusul manuver diplomatik tersebut, pemerintah Taiwan menyatakan kekecewaan besarnya. Bahwasanya dukungan signifikan yang diberikan masyarakat bagi Solomon Islands pada akhirnya tidak diikuti komitmen dan konsistensi dalam mendukung kemerdekaan Taiwan (Office President of Republic of China 2019).

Sebaliknya bagi Tiongkok, *diplomatic switch* Solomon Islands merefleksikan keberhasilan implementasi kebijakan luar negerinya di Pasifik Selatan. Kehadiran Tiongkok memang meningkat signifikan dalam dua dekade terakhir, memperlihatkan bahwa walaupun terdiri dari negara-negara kecil Pasifik Selatan adalah wilayah strategis bagi kepentingan nasional dan internasional Tiongkok. Kunjungan langsung Premier Wen Jiabao ke Fiji pada tahun 2006 menjadi *turning point* bagi babak baru relasi *Sino-Pacific*. Bersamaan inisiasi program China-Pacific Islands Countries Economic Development Cooperation Ministerial Conference, pihak Tiongkok menegaskan adanya komitmen yang lebih besar membantu agenda pembangunan sosial-ekonomi di kawasan. Hal ini menghasilkan implikasi langsung berupa peningkatan intensitas bantuan luar negeri, investasi, dan perdagangan melalui skema kerjasama bilateral bersama masing-masing PICs maupun dalam kerangka multilateralisme regional (Shie 2007). Dewasa ini Tiongkok memantapkan posisinya sebagai *secondary regional power* yang memiliki relasi dan kontribusi penting di kalangan PICs. Terlihat terdapat dua kali kunjungan langsung Xi Jinping ke Fiji dan Papua Nugini pada tahun 2014 dan 2018. Sejak saat itu, kunjungan balasan dari pimpinan PICs “aliansi” Tiongkok ke Beijing juga terbilang intens dan menghasilkan berbagai bentuk peningkatan kerjasama bilateral dan regional. Masing-masing pihak kemudian

menyepakati peningkatan status relasi diplomatik dari *friendly and cooperative relations* menjadi *comprehensive strategic partnership* bersama Pemerintah Tiongkok. Delapan pemerintah PICs kemudian menandatangani MoU penerapan Belt and Road Initiative (BRI) yang mana Kawasan Pasifik Selatan menjadi bagian dari rancangan 21st Maritime Silk Road Tiongkok.

Perpindahan relasi diplomatik menjadi basis penguatan hubungan baik Solomon Islands dan Tiongkok yang selama ini telah berlangsung di luar kerangka *government to government*. Babak baru hubungan Solomon Islands-Tiongkok ditandai kunjungan langsung Perdana Menteri Sogavare ke Beijing pada Oktober 2019. Kedua pemerintahan kemudian meresmikan hubungan diplomatik sekaligus penandatanganan integrasi Solomon Islands dalam skema pembangunan BRI. Dalam pertemuannya langsung dengan Xi Jinping dan Li Keqiang, dua pimpinan tertinggi Tiongkok, PM Sogavare menyatakan komitmen besar negaranya untuk patuh terhadap prinsip *One China* sesuai kesepakatan UN Assembly. Selain itu, dengan terbangunnya relasi diplomatik langsung, pihak Solomon Islands mengharapkan peningkatan aktivitas perdagangan serta lebih banyak lagi keterlibatan perusahaan-perusahaan Tiongkok dalam proses pembangunan ekonomi dan iklim bisnis di wilayah Solomon Islands (Embassy of PRC in Republic of Botswana 2019). Termasuk di dalamnya menggantikan Taiwan sebagai kontributor utama bagi keberlangsungan program *constituency development funds* (The State Council of PRC 2019).

Hubungan diplomatik memungkinkan Solomon Islands dan Tiongkok mengeksplorasi lingkup kerjasama lain di luar ranah ekonomi, perdagangan, dan bisnis. Seperti halnya di tengah gelombang pandemi, pihak Tiongkok mendukung Solomon Islands dalam bentuk *technical assistance*, bantuan pendanaan, dan suplai peralatan medis secara langsung (Solomon Islands Government 2020). Dewasa ini, hubungan Solomon Islands dan Tiongkok bahkan mulai merambah bidang pertahanan dan keamanan. Berdasarkan laporan Powless (dalam Liu 2022), kedua pemerintahan telah menyepakati pakta pertahanan bilateral, memungkinkan Tiongkok dalam mengerahkan kekuatan pertahanan dan keamanannya di kawasan. Terdapat beberapa poin krusial terkait perjanjian tersebut di antaranya, bantuan Tiongkok dalam memperkuat kapasitas keamanan nasional Solomon Islands. Kedua pemerintahan juga menyepakati kerjasama bidang humanitarian, respon bencana alam, dan *maintaining social order*. Maka dari itu Pemerintah Solomon Islands memperbolehkan kunjungan kapal perang dan elemen logistik pertahanan Tiongkok lainnya sebagai realisasi pakta pertahanan.

Cheque-Book Diplomacy di Balik Kebijakan Pemerintahan Solomon Islands Beralih Mendukung Tiongkok

Keputusan Pemerintah Solomon Islands beralih mendukung Tiongkok dihasilkan dari perhitungan rasional mengenai potensi mendapatkan keuntungan yang lebih besar apabila tergabung dalam Blok-Tiongkok dibandingkan Taiwan. Selama lebih dari tiga puluh tahun menjalin relasi formal dengan Taiwan, pihak Solomon Islands sejatinya telah mendapatkan manfaat yang terbilang signifikan. Berdasarkan himpunan data Pacific Aid Maps (2022) dalam rentang tahun 2008-2021, Solomon Islands menjadi PICs penerima ODA terbesar dari Taiwan. Tercatat dari 497,6 juta USD keseluruhan ODA Taiwan di Pasifik Selatan pada periode tersebut, sebanyak 27,5% atau 137,22 juta USD diperuntukkan bagi Solomon Islands. Besarnya dana bantuan Taiwan tersebut dipergunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan nasional. Sebagian besar berwujud bantuan teknis dalam meningkatkan produktivitas sektor agrikultur dan perikanan lokal serta perbaikan kesehatan dan pendidikan masyarakat setempat. Namun tidak sedikit pula yang direalisasikan dalam bentuk pembangunan infrastruktur fisik penunjang aktivitas perekonomian lokal Solomon Islands.

Pertimbangan keuntungan ekonomi menjadi poin krusial bagi *less developed state* seperti Solomon Islands dan PICs lainnya dalam menentukan afiliasi politik internasionalnya. Terkait hal ini, besarnya komitmen dan kontribusi Tiongkok terhadap pembangunan kawasan dewasa ini tidak dipungkiri menjadi alasan pokok di balik keputusan Solomon Islands mengakhiri dukungan diplomatiknya bagi Taiwan. Seperti halnya diungkapkan Aqorau (2021) terdapat tiga faktor yang melandasi keputusan Pemerintah Solomon Islands. Pertama adalah realita bahwa Tiongkok merupakan partner perdagangan utama Solomon Islands. Tercatat pada data World Bank (2022), pada tahun 2018 keduanya mencatatkan nilai ekspor-impor sebesar 748 juta USD yang mana pihak Solomon Islands mendapatkan keuntungan surplus perdagangan hingga mencapai 512 juta USD dari penjualan bahan tambang, perikanan, dan sumberdaya kehutanan ke Tiongkok. Faktor kedua adalah dominasi pengusaha Tiongkok dalam iklim ekonomi dan bisnis di Solomon Islands utamanya pada sektor retail. Sementara faktor ketiga berhubungan dengan relasi kuat *sister province* antara Guangdong dan Guadalcanal, memungkinkan pemerintah dan masyarakat Solomon Islands berinteraksi lebih banyak dengan pihak Tiongkok dibandingkan Taiwan.

Dengan beralih mendukung Tiongkok, Solomon Islands mengharapkan perolehan dukungan dana bantuan dan investasi yang lebih besar. Realitanya, selama ini jumlah bantuan Taiwan bagi Pasifik Selatan tidak sebanding besarnya nilai ODA Tiongkok yang mencapai 2,73 miliar USD

dalam rentang tahun 2008-2021. Keseluruhan dana bantuan tersebut terdistribusikan khusus bagi kalangan PICs Blok-Tiongkok, sehingga negara seperti Papua Nugini, Fiji, Samoa, Tonga, dan Vanuatu mampu mendapatkan dana bantuan hingga pada kisaran 250-960 juta USD dalam rentang waktu tersebut. Implementasi program BRI di Pasifik Selatan kemudian menyediakan prospek aliran dana yang lebih besar bagi negara-negara tersebut. Sejak disepakati pada tahun 2018, lebih dari tiga puluh proyek pembangunan dan pemberdayaan masyarakat bernilai miliaran USD telah dilaksanakan. Beberapa di antaranya adalah proyek pengembangan infrastruktur besar seperti pembangunan kawasan industri Sandaun di Papua Nugini yang bernilai 4 miliar USD, perbaikan jalan Tanna-Malekula di Vanuatu bernilai 52 juta USD, dan pembaharuan jalan Nabouwalu-Dreketi di Fiji dengan biaya 135 juta USD (Li 2022). Masifnya dana bantuan yang didapatkan PICs pendukung Tiongkok begitu timpang dikomparasikan pendapatan ODA negara-negara kawasan di Blok-Taiwan. Pada periode yang sama, sebagai penerima bantuan terbesar dari Taiwan, Solomon Islands hanya memperoleh dukungan dana maksimal 138 juta USD. Begitu pula dengan Kiribati yang hanya menerima bantuan sebesar 128 juta USD (Pacific Aid Maps 2021).

Keputusan Solomon Islands berpihak pada Tiongkok diikuti keikutsertaannya dalam program BRI sejauh ini menyajikan prospek positif. Walaupun terhambat krisis pandemi, diestimasikan bahwa Tiongkok sudah mengalirkan dana bantuan sebesar 104,15 juta USD dalam kurun waktu 2019 hingga 2021. Bantuan tersebut meliputi pendanaan Rural Constituency Development sebesar 34,25 juta USD dan pembangunan stadion nasional bagi penyelenggaraan Pacific Games 2023 sebesar 17,67 juta USD (Pacific Aid Maps 2021). Pihak Tiongkok juga terlihat berpartisipasi aktif dalam menyuplai kebutuhan material Solomon Islands di masa pandemi. Di antaranya pada awal April tahun 2020, Pemerintah Tiongkok memberikan dana hibah sebanyak 2,8 juta USD beserta *technical assistance* dan peralatan kesehatan guna meningkatkan kapabilitas dan kapasitas otoritas kesehatan setempat menghadapi ancaman pandemi (Solomon Islands Government 2020). Memasuki masa *global recovery* pada tahun 2021, Tiongkok bertindak sebagai penyuplai vaksin utama bagi masyarakat Solomon Islands. Sementara bantuan dana dan kelengkapan medis lainnya masih dilakukan secara konsisten. Puncaknya pada tahun 2022, Tiongkok kembali memberikan dana bantuan sebesar 350 ribu USD guna menstimulus perbaikan perekonomian Solomon Islands pasca pandemi (Global Times 2022).

Serangkaian realisasi kerjasama komprehensif dalam hubungan diplomatik baru antara Pemerintah Solomon Islands-Tiongkok tidak serta merta mengakhiri persaingan diplomatik Tiongkok dan Taiwan di Solomon Islands. Kenyataan bahwa Negara-negara Pasifik Selatan memiliki kecenderungan tidak konsisten dalam menentukan afiliasi politik internasionalnya, mendesak Tiongkok dan Taiwan terus bersaing

bersaing meningkatkan kontribusinya bagi Solomon Islands dan PICs lainnya. Pihak Taiwan hingga kini masih terhubung dengan Solomon Islands melalui saluran informal. Hal ini dapat dilihat dari adanya dukungan Pemerintah Taiwan terhadap Pemerintah Provinsi Malaita yang sejak awal menolak keputusan pemerintah pusat di Honiara beralih mendukung Tiongkok. Dalam pernyataannya, Daniel Suidani yang merupakan pemimpin Provinsi Malaita mengecam keputusan pemerintah pusat dengan dalil bahwasanya serangkaian kesepakatan dan bantuan ekonomi Tiongkok hanya akan merugikan pihak Solomon Islands seiring pembengkakan tingkat hutang luar negeri negara. Lebih lanjut pihaknya menekankan bahwa relasi bersama Tiongkok berpotensi mempengaruhi iklim kebebasan dan praktik demokrasi di Solomon Islands. Pihak Malaita mengancam akan melakukan blockade aktivitas ekonomi dan bisnis Tiongkok bahkan menginisiasi gerakan separatisme apabila aspirasinya tidak diindahkan Pemerintah Solomon Islands (Hollingsworth 2020). Sejauh ini koneksi Malaita dan Taiwan masih sebatas pemberian bantuan suplai perangkat medis dan kebutuhan pokok dalam menghadapi krisis pandemi. Akan tetapi keterlibatan Amerika Serikat dalam mendukung langkah Taiwan, menjanjikan suplai bantuan hingga 25 juta USD, berpotensi melahirkan krisis politik mandalam antara pihak Honiara dan Malaita (McDonald 2020).

Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas maka ditarik kesimpulan bahwa kebijakan *diplomatic switching* Solomon Islands dari Taiwan ke Tiongkok pada tahun 2019 tidak lepas dari dinamika persetujuan *cheque-book diplomacy* di Kawasan Pasifik Selatan. Dapat dikatakan bahwa pilihan berbalik mendukung Tiongkok adalah buah dari kalkulasi rasional pemerintah dalam melihat perubahan tatanan regional dan internasional terkini. Perkembangan pengaruh Tiongkok yang ditandai peningkatan jumlah bantuan luar negeri, nilai investasi, dan perdagangan secara signifikan di kawasan menyediakan peluang bagi Solomon Islands dalam memperoleh keuntungan yang lebih besar. Pada kenyataannya, selama lebih dari tiga puluh tahun menjadi partner strategis Taiwan, penerimaan bantuan pembangunan yang diterima Solomon Islands relatif inferior jika dikomparasikan aliran bantuan dan investasi pembangunan yang diterima PICs “aliansi” Tiongkok. Di sisi lain, meskipun tidak menjalin hubungan formal, sejak dahulu Tiongkok sudah menjadi partner perdagangan terpenting bagi Solomon Islands yang mana hampir keseluruhan komoditas mentah yang dihasilkan diimpor oleh industri besar di Tiongkok. Selama tiga tahun menjalin hubungan formal bersama Tiongkok dan terintegrasi dalam ambisi besar BRI, Solomon Islands telah menerima serangkaian manfaat. Dimulai dari kontribusi dana Tiongkok bagi pembangunan stadion nasional hingga pendanaan bagi program pembangunan *constituency funds*. Pemerintah Tiongkok juga terbilang aktif memberikan dukungan baik teknis maupun material bagi upaya penanganan masalah pandemi di Solomon Islands. Kedepannya, terciptanya hubungan diplomatik Solomon Islands-Tiongkok dapat menjadi basis bagi perluasan ruang lingkup kerjasama strategis di antara keduanya.

References

Buku

Munro, Dana G., 1964. *Intervention and Dollar Diplomacy in Caribbean*. Princeton: Princeton University Press.

Artikel dalam Buku

Aqorau, Transform, 2021. "Solomon Islands Foreign Policy Dilemma and The Switch from Taiwan to China", *The China Alternative*. Australia: ANU Press.

Artikel Jurnal

Biddick, Thomas V., 1989. "Rivalry in the South Pacific: The PRC and Taiwan", *Asian Survey*, 29(8): 800-815.

Artikel Online

Batley, James, 2016. "Constituency Development Funds in Solomon Islands" [online]. In https://dpa.bellschool.anu.edu.au/sites/default/files/publications/attachments/2016-07/ib2015.67_batley.pdf [accessed on February 17, 2023].

Bauer, Sydney, 2023. "The Pacific Games Wrap Small Countries in Big Power Struggles" [online]. In <https://foreignpolicy.com/2023/02/03/solomon-islands-pacific-games-china-united-states-australia/> [accessed on February 17, 2023].

Dayant, Alexandre dan Euan Moyle, 2020. "Chequebook Diplomacy in The Pacific: Not Just a Big Fish" [online]. In <https://www.lowyinstitute.org/the-interpretor/chequebook-diplomacy-pacific-not-just-big-fish> [accessed on February 17, 2023].

Elman, Miriam Fendius, 2015. "The Foreign Policy of Small States: Challenging Neorealism in Its Own Backyard" [online]. In <http://www.maihold.org/mediapool/113/1132142/data/Fendius.pdf> [accessed on February 18, 2023].

Embassy of the People's Republic of China in Australia, 2021. "Xi Jinping Speaks with Prime Minister of Solomon Islands" [online]. In http://au.china-embassy.gov.cn/eng/zgxw_4/202109/t20210925_9590160.htm. [accessed on February 18, 2023].

- Global Times, 2022. "Chinese Aircraft Arrived in Solomon Islands with Anti Epidemic Supplies" [online]. In <https://www.globaltimes.cn/page/202202/1252588.shtml>. [accessed on February 18, 2023].
- Hollingsworth, Julia, 2020. "The Pacific Islands Province is Frustrated with China's Presence That it's Pushing for Independence" [online]. In <https://edition.cnn.com/2020/09/17/asia/solomon-islands-malaita-intl-hnk-dst/index.html> [accessed on February 18, 2023].
- Karambelkar, Amruta, 2022. "The China-Solomon Islands Bilateral Security Pact" [online]. In <https://www.vifindia.org/sites/default/files/The-China-Solomon-Islands-Bilateral-Security-Pact.pdf> [accessed on February 17, 2023].
- Li, Carol, 2022. "The Belt and Road Initiative in Oceania: Understanding the People's Republic of China Strategic Interest and Engagement in Pacific" [online]. In <https://www.cfe-dmha.org/LinkClick.aspx?fileticket=FaplgGeo2ps%3D&portalid=0>. [accessed on February 17, 2023].
- Liu, Zongyuan Zoe, 2022. "What China-Solomon Islands Pact Means for the US and South Pacific" [online]. In <https://www.cfr.org/in-brief/china-solomon-islands-security-pact-us-south-pacific>. [accessed on February 18, 2023].
- Maddern, Stacy W., 2020. "Dollar Diplomacy: Roosevelt to Taft 1890-1913" [online]. In https://www.academia.edu/es/43524461/Dollar_Diplomacy_Roosevelt_To_Taft. [accessed on February 17, 2023].
- McDonald, Joshua, 2020. "US Aid Pledge to Pro Taiwan Solomon Islands Province Raises Eyebrow" [online]. In <https://thediomat.com/2020/10/us-aid-pledge-to-pro-taiwan-solomon-islands-province-raises-eyebrows/> [accessed on February 18, 2023].
- Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China, 2022. "Cooperation between China and the Pacific Islands Countries" [online]. In https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjdt_665385/2649_665393/202205/t20220524_10691917.html [accessed on February 18, 2023].
- Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China, 2022. "Eight Pronged Important Consensus Reached by China and Solomon Islands" [online]. In https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/zxxx_662805/202205/t20220527_10693484.html [accessed on February 18, 2023].

- Nicholas, Josh, 2021. "How China Dominates the Pacific's Logging, Mining, and Fishing" [online]. In <https://www.theguardian.com/world/2021/may/31/the-3bn-bargain-how-china-dominates-pacific-mining-logging-and-fishing> [accessed on February 18, 2023].
- OECD Data, 2022. "China and Solomon Islands Economic Data" [online]. In <https://oec.world/en/profile/bilateral-country/chn/partner/slb> [accessed on February 18, 2023].
- Office of the President Republic of China, 2019. "President Tsai's Statement on Termination of Diplomatic Relations with Solomon Islands" [online]. In <https://english.president.gov.tw/News/5843>. [accessed on February 17, 2023].
- Salem, Saber, 2020. "Sino-Taiwan Cheque-book Diplomacy in The Pacific" [online]. In <https://www.e-ir.info/2020/06/22/sino-taiwan-chequebook-diplomacy-in-the-pacific/> [accessed on February 18, 2023].
- Solomon Islands Broadcasting Corporation, 2017. "Taiwan Disburse 29 million for Constituency Development Funds" [online]. In <https://www.sibconline.com.sb/taiwan-disburses-29m-for-constituency-development-fund/> [accessed on February 17, 2023].
- Solomon Islands Government, 2020. "PRC Hands 2,5 million USD in Cash to Fight Covid-19" [online]. In <https://solomons.gov.sb/prc-hands-2-5m-in-cash-grant-to-fight-covid-19/>. [accessed on February 17, 2023].
- Solomon Times, 2014. "The Constituency Development Funds Release" [online]. In <https://www.solomontimes.com/news/constituency-development-funds-released/8053>. [accessed on February 17, 2023].
- State Council of the Peoples Republic of China, 2019. "Premier Li Meets with Solomon Islands PM" [online]. In http://english.www.gov.cn/premier/news/201910/09/content_WS5d9dd032c6d0bcf8c4c14c83.html. [accessed on February 17, 2023].
- Steinsson, Sverrir dan Buldur Thorhallsson, 2017. "Small States Foreign Policy" [online]. In file:///C:/Users/katong/Downloads/ThorhallssonandSteinsson-SmallStateForeignPolicy.pdf [accessed on February 18, 2023].

- Transparency Solomon Islands, 2017. "Consultancy Development Funds Community Consultation and Assesement Workshop" [online]. In https://www.solomonchamber.com.sb/media/1356/tsi_undp_cdf-project-presentation_2017-development-partners-11072017.pdf [accessed on February 18, 2023].
- Zhang, Denghua, 2019. "Comparing China and Taiwan Aid to Pacific" [online]. In https://openresearch-repository.anu.edu.au/bitstream/1885/186125/1/ib_2019_20_zhang_final.pdf [accessed on February 18, 2023].